



**Kantor Wilayah Kemenkumham Padang
Setjen**

(408798)

Periode 01 Januari s.d 30 Juni 2023

Semester I TA 2023

Jl. S.Parman No. 256 – Padang 25133

Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, Juli 2023
Kepala Kantor Wilayah,

Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
PernyataanTanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas	6
V Catatan atas Laporan Keuangan	7
A Penjelasan Umum	7
B Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
LAMPIRAN	

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA
BARAT**

**JL. S. PARMAN NO. 256 PADANG – SUMATERA BARAT 25133
TELEPON 0751 7055471, FAXIMILE 0751 7055510**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internyang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, Juli 2023
Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Periode 30 Juni 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.444.875 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp9.714.161.375,- atau mencapai 47,97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.249.181.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp106.484.422.000,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp267.148.738; Aset Tetap (neto) sebesar Rp106.216.823.262; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp450.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.122.957.056- dan Rp105.361.464.944.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp8.375.327 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.141.334.359 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp10.132.959.032). Defisit Kegiatan Non Operasional masing-masing sebesar Rp370.748 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp10.132.588.284).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp105.324.816.833 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp10.132.588.284 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.169.236.395 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp105.361.464.944.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT SEKRETARIAT JENDERAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Th 2023		% thd Angg	Th 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	7444875	0.00	5485341
JUMLAH PENDAPATAN		-	7,444,875	0.00	5,485,341
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	10,765,198,000	5,839,730,178	54%	5,634,999,299
Belanja Barang	B.4	6,985,891,000	3,431,489,747	49	3,361,654,732
Belanja Modal	B.5	2,498,092,000	442,941,450	0	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		20,249,181,000	9,714,161,375	47.97	8,996,654,031

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	240,000,000	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	1,301,200	
Piutang Bukan Pajak (Netto)		1,301,200	0
Persediaan	C.3	25,847,538	43,646,964
Jumlah Aset Lancar		267,148,738	43,646,964
ASET TETAP			
Tanah	C.4	84,712,482,000	84,712,482,000
Peralatan dan Mesin	C.5	11,455,645,454	10,494,079,704
Gedung dan Bangunan	C.6	19,934,042,000	19,934,042,000
Aset Tetap Lainnya	C.7	135,012,928	135,012,928
Konstruksi dalam pengerjaan	C.8	2,810,836,950	2,810,836,950
AKUMULASI PENYUSUTAN		(12,831,196,070)	(12,775,091,665)
Jumlah Aset Tetap		106,216,823,262	105,311,361,917
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	140,903,000	140,903,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(140,453,000)	(140,453,000)
Jumlah Aset Lainnya		450,000	450,000
JUMLAH ASET		106,484,422,000	105,355,458,881
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	834,457,056	30,642,048
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.12	48,500,000	0
Uang Muka dari KPPN	C.13	240,000,000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,122,957,056	30,642,048
JUMLAH KEWAJIBAN		1,122,957,056	30,642,048
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	105,361,464,944	105,324,816,833
JUMLAH EKUITAS		105,361,464,944	105,324,816,833
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		106,484,422,000	105,355,458,881

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE 30 JUNI 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	8,375,327	6,448,094
JUMLAH PENDAPATAN		8,375,327	6,448,094
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,618,987,234	7,099,035,996
Beban Persediaan	D.3	49,309,226	53,824,840
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,907,596,953	2,429,253,080
Beban Pemeliharaan	D.5	707,560,630	519,224,802
Beban Perjalanan Dinas	D.6	857,880,316	414,736,616
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	0	545,650,438
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	-	-
JUMLAH BEBAN		10,141,334,359	11,061,725,772
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10,132,959,032)	(11,055,277,678)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar	D.9	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		370,748	150
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		370,748	150
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		370,748	150
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(10,132,588,284)	(11,055,277,528)
SURPLUS/DEFISIT LO		(10,132,588,284)	(11,055,277,528)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	105,324,816,833	44,808,071,857
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(10,132,588,284)	(11,055,277,528)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10,169,236,395	8,991,168,690
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		36,648,111	(2,064,108,838)
EKUITAS AKHIR	E.5	105,361,464,944	42,743,963,019

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Entitas berkedudukan di Jalan S. Parman No. 256 UlakKarang Padang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat berkomitmen dengan visi **“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Barat yang Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia.”**

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
- Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerja sama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;

- Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;
- Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat periode Juni 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat adalah 1 satuan kerja.

Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	0800	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang (408798)	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 30 Juni 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional

antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan	10%

	pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai

yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak tiga kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp17.496.194.000 setelah revisi terakhir menjadi Rp20.249.181.000.

Sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	30 JUNI 2023	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	10,765,198,000	10,765,198,000
Belanja Barang	6,197,041,000	6,985,891,000
Belanja Modal	533,955,000	2,498,092,000
Jumlah Belanja	17,496,194,000	20,249,181,000

Revisi yang dilakukan merupakan revisi DIPA Belanja Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, revisi penyesuaian halaman III DIPA, revisi POK dalam satu KRO dan revisi Anggaran Belanja Tambahan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sehingga menambah nilai pagu anggaran.

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp10.997.190*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp7.444.875 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terdiri dari Pendapatan dari pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, dan penerimaan kembali belanja pegawai dari tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 JUNI 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	7,074,127	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	370,748	0.00
Jumlah	-	7,444,875	0.00

Realisasi Pendapatan pada 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar 35,72% dibandingkan pada 30 Juni 2022. Realisasi Pendapatan mengalami peningkatan dari sebesar Rp5.485.341

menjadi Rp7.444.875 dikarenakan pada periode ini realisasi pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa rumah dinas dan penerimaan kembali Belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan pegawai yang naik pangkat/JFT semakin bertambah.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	7,074,127	5,485,191	28.97
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	370,748	150	0.00
Jumlah	7,444,875	5,485,341	35.72

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp9.714.161.375*

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp9.714.161.375 atau 47,97% dari anggaran belanja sebesar Rp20.249.181.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Periode 30 Juni 2023*

Uraian	30 JUNI 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10,765,198,000	5,839,730,178	54.25
Belanja Barang	6,985,891,000	3,431,489,747	49.12
Belanja Modal	2,498,092,000	442,941,450	0.00
Total Belanja Kotor	20,249,181,000	9,714,161,375	47.97
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah	20,249,181,000	9,714,161,375	47.97

Dibandingkan dengan 30 Juni 2022, Realisasi Anggaran 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,98%. Hal ini disebabkan terdapatnya realisasi belanja pegawai sebesar Rp5.839.730.178, realisasi belanja barang sebesar Rp3.431.489.747 dan realisasi belanja modal sebesar Rp442.941.450.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5,839,730,178	5,634,999,299	3.63
Belanja Barang	3,431,489,747	3,361,654,732	2.08
Belanja Modal	442,941,450	0	0.00
Jumlah	9,714,161,375	8,996,654,031	7.98

*Belanja Pegawai
Rp5.839.730.178*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.839.730.178 dan Rp5.634.999.299. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pada 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,63% dari 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Terdapat kenaikan pembayaran gaji PNS sebesar 3,69%;
2. Bertambahnya jumlah pegawai yang berasal dari penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2021 serta pegawai promosi dan mutasi;
3. Adanya perubahan jabatan pegawai dari JFU menjadi JFT sehingga mengakibatkan bertambahnya realisasi anggaran untuk tunjangan fungsional PNS;
4. Adanya pegawai yang masa jabatannya berakhir (pensiun).

*Perbandingan Belanja Pegawai
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,805,011,210	5,526,877,423	5.03
Belanja Lembur	35,089,000	108,122,000	(67.55)
Jumlah Belanja Kotor	5,840,100,210	5,634,999,423	3.64
Pengembalian Belanja Pegawai	(370,032)	124	-
Jumlah Belanja	5,839,730,178	5,634,999,547	3.63

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp3.431.489.747*

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.431.489.747 dan Rp3.361.654.732. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,08% dari Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2022.

*Perbandingan Belanja Barang
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	660,403,715	785,652,602	(15.94)
Belanja Barang Non Operasional	237,176,850	339,210,895	(30.08)
Belanja Jasa	985,458,436	1,246,996,583	(20.97)
Belanja Pemeliharaan	659,060,630	518,524,802	27.10
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	857,880,316	410,701,616	108.88
Belanja Barang Persediaan	31,509,800	60,568,234	(47.98)
Jumlah Belanja	3,431,489,747	3,361,654,732	2.08

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp109.703.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp54.245.000 yang terdiri dari Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 berupa Pembelian lisensi aplikasi *zoom meeting*. Realisasi ini juga berasal dari Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 berupa Pembelian Multivitamin.

Rincian belanja Penanganan COVID-19 dapat dilihat sebagai berikut:

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	27,903,000	1,245,000	4,46%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	72,800,000	53.000.000	72,8%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	7.000.000	0	0%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.000.000	0	0%

B.5 Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp.2.498.092.000 untuk Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa Belanja Peralatan dan Mesin yang terdiri dari meja rapat, work station, AC Portabel, AC Split, Sound System, Mesin Absen dan Laptop. Selain itu Belanja Modal juga dianggarkan untuk layanan Prasarana Internal berupa Gedung dan Bangunan yang terdiri dari penambahan nilai Gedung dan bangunan rumah dinas dan hall serbaguna. Pada periode ini belanja modal realisasi belanja modal sebesar Rp442.941.450 yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin yaitu Belanja Peralatan dan Mesin yang terdiri dari meja rapat, work station, AC Split, Sound System, Mesin Absen dan Laptop.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2022	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	442,941,450	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	442,941,450	0	0.00
Jumlah Belanja	442,941,450	0	0.00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.442.941.450,- dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	442.941.450	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	442.941.450	0	0.00
Jumlah Belanja	442.941.450	0	0.00

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin ini adalah sebesar Rp533.955.000,- yang terdiri dari Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa Belanja Peralatan dan Mesin yang terdiri dari meja rapat, work station, AC Portabel, AC Split, Sound System, Mesin Absen dan Laptop .

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin ini adalah sebesar Rp1.964.137.000,- yang terdiri dari layanan Prasarana Internal berupa Gedung dan Bangunan yang terdiri dari penambahan nilai Gedung dan bangunan rumah dinas dan hall serbaguna.

Pada deriode ini Belanja Modal Gedung dan Bangunan belum terealisasi.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp240.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesarRp240.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara pertanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Periode 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022*

Keterangan	30 JUNI 2023	31 Desember 2022
Uang Tunai di Brankas	10,181,045	0
Uang di Rekening Bank BNI 0667977329	229,818,955	0
Jumlah	240,000,000	0

C.2 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp1.301.200*

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.301.200 dan Rp0,-.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023 adalah pendapatan sewa rumah dinas bulan Juli yang belum di SP2Dkan.

C.3 Persediaan

*Persediaan
Rp25.847.538*

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp25.847.538 dan Rp43.646.964,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
Periode 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022*

Jenis	30 JUNI 2023	31 DESEMBER 2022
Barang Konsumsi	25,847,538	43,646,964
Jumlah	43,646,964	43,646,964

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.4 Tanah

*Tanah
Rp84.712.482.000*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat per 30 Juni

2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp84.712.482.000,- dan Rp84.712.482.000,-.

Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Periode 30 Juni 2023

No	Uraian	Luas Tanah (m2)	Alamat	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	504	JL. KEHAKIMAN NO.5 PADANG	724,828,000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2,222	JL. PADANG PASIR X	5,204,480,000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	315	JL. JAKARTA	720,049,000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	480	JL. ASRAMA HAJI	705,600,000
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	372	JL. BUNDA	432,813,000
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	640	JL. TEKNOLOGI VIII SITEBA	1,050,772,000
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	204	JL. WIRASAKTI KOMPI C SITEBA	317,179,000
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	500	JL. NGURAH RAI II NO. 1 AIR TAWAR	791,000,000
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	500	JL. NGURAH RAI II NO. 2 AIR TAWAR	791,000,000
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,600	S. PARMAN NO.256+	6,095,700,000
11	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,850	Jl.Raya Bukittinggi-medan	233,294,000
12	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,079	Jl.Ke Talu	196,982,000
13	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	499	JL. IMAM BONJOL	298,913,000
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	320		343,571,000
15	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,250	JL. BATUSANGKAR-TABEK PATAH	1,342,075,000
16	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	605	JL. GAJAH MADA	327,895,000
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	320	JL PANTI - TALU	82,152,000
18	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	260	JLN KOTO KECIL	146,057,000
19	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	950	DEKAT KANTOR CAMAT	546,992,000
20	Tanah Rawa	3,015	-	3,976,450,000
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,426	JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN BUKITTINGGI	60,384,680,000
	Jumlah			84,712,482,000

*Peralatan dan Mesin
Rp11.455.645.454*

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp11.455.645.454 dan Rp10.494.079.704.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10,494,079,704
Mutasi tambah:	
Pembelian	442,941,450
Transfer Masuk	520,080,300
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(1,456,000)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Penghapusan	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 30 Juni 2023	11,455,645,454
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(9,587,796,607)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	1,867,848,847

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing Rp11.455.645.454 dan Rp9.473.042.415. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset peralatan dan mesin yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

*Gedung dan
Bangunan
Rp19.934.042.000*

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp19.934.042.000 dan Rp19.934.042.000. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan TA 2023

No	Uraian	Luas Bangunan (m ²)	Alamat	Nilai	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4	JL. S. PARMAN NO 256 PADANG	6.961.000	POS SATPAM, PRAKIRAN, DAN GU
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	150		743.667.000	MUSHOLA KANWIL
3	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	350	JL. KEHAKIMAN NO 5 PADANG	745.943.000	RUMAH DINAS KAKANWIL
4	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	JL. PADANG PASIR X	255.752.000	RUMAH DINAS KADIV, ADMINISTRASI DAN PAGAR
5	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	140	JL. PADANG PASIR X	298.377.000	-
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	120	UNP PADANG	255.752.000	-
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	JL. JAKARTA ASRATEK	143.663.000	-
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	ASRAMA HAJI	149.189.000	-
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	ASRAMA HAJI	149.189.000	-

No	Uraian	Luas Bangunan (m2)	Alamat	Nilai	Keterangan
10	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	JL. BUNDA V WISMA WARTA	149,189,000	-
11	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	PADANG PASIR X	149,189,000	-
12	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	PADANG PASIR X	149,189,000	-
13	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	50	PADANG PASIR X	149,189,000	-
14	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	50	PADANG PASIR X	102,617,000	-
15	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	JL. WIRASAKTI SITEBA (DEPAN KOMPI C)	143,663,000	JL. WIRASAKTI SITEBA ASET SUDAH LAMA ADA
16	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL. TEKNOLOGI VIII SITEBA PADANG	106,563,000	RUMAH DINAS JL. TEKNOLOGI SITEBA
17	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL. TEKNOLOGI VIII PADANG	106,563,000	RUMAH DINAS JL. TEKNOLOGI SITEBA
18	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL TEKNOLOGI VIII SITEBA PADANG	106,563,000	JL TEKNOLOGI SITEBA
19	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL TEKNOLOGI NO VIII PADANG	106,563,000	JL TEKNOLOGI SITEBA
20	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	60	JL. S. PARMAN NO 256 PADANG	127,876,000	RUMAH DINAS JL.S PARMAN NO 256 PADANG
21	Bangunan Tempat Sidang/Zitting	250		662,061,000	MUO MA
22	Bangunan Tempat Sidang/Zitting	305		807,714,000	MOU MA
23	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		670,605,000	MUO MA
24	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		670,605,000	MUO MA
25	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		670,605,000	MOU MA
26	Gedung Pos Jaga Permanen	20	S.PARMAN	27,204,000	KANWIL

No	Uraian	Luas Bangunan (m2)	Alamat	Nilai	Keterangan
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	600	S.PARMAN NO.256 PADANG	1,681,481,000	GEDUNG C KANWIL
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	510	S.PARMAN NO.256 PADANG	1,429,259,000	GEDUNG C KANWIL
29	Bangunan Gedung Kantor Permanen	537	S.PARMAN NO.256	1,621,153,000	GEDUNG C KANWIL
30	Bangunan Gedung Kantor Permanen	293	S.PARMAN NO.256 PADANG	821,123,000	GEDUNG C KANWIL
31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	NIPAH NO. 50 PADANG	201,427,000	GEDUNG C KANWIL
32	Bangunan Gedung Kantor Permanen	240	DAERAH KANDI	887,448,000	LPKN SAWAHLUNTO
33	Pagar permanen			2,842,170,000	TEMBOK KELL RTN SWH LNT
34	Pagar permanen			1,180,656,000	TEMBOK KLL RUTAN TALU
35	Pagar permanen			49,891,000	PAGAR RD AIR TAWAR
36	Pagar permanen			49,891,000	PAGAR RD. S. PARMAN
37	Pagar permanen			49,891,000	PAGAR RD TABING
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja		JLM. PERINTIS KEMERDEKAAN BUKITTINGGI	1,147,497,000	BANGUNAN EX LAPAS BUKITTINGGI

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp3.232.924.463 dan Rp3.232.934.463.

C.7 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp135.012.928*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp135.012.928 dan Rp132.537.928. Nilai Aset tetap lainnya per 30 Juni 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan

dengan per 30 Juni 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	135,012,928
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Transfer Masuk	0
Saldo per 30 Juni 2023	135,012,928
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(10,475,000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	124,537,928

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.810.836.950 dan Rp2.810.836.950.

Rincian KDP per 30 Juni 2023 sebagai berikut :

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp2.810.836.950*

NO	NAMA KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PEKERJAAN	SALDO KDP
1	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.01-146	PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA	2,323,000,000	24 November 2010	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2 LANTAI LP WANITA PASAMAN (APBN-P) (100%)	2,323,000,000
2	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.01-73	CV. KORANA KARYA	213,709,000	30 Agustus 2010	PERENCANAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LP WANITA PASAMAN (85%)	181,652,650
3	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.01-149	CV. KARYA CIPTA CONSULTANT	49,000,000	04 November 2010	PENGAWASAN GEDUNG KANTOR LP WANITA PASAMAN (55%)	26,950,000
4	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan					BIAYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI	28,434,300
5	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.04-114A	CV. KARYA ENGINEER	313,500,000	15 September 2010	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BLOK HUNIAN 2 LANTAI (APBN-P) GEDUNG KHUSUS LP WANITA PASAMAN (85%)	250,800,000
TOTAL KDP							2,810,836,950

*Aset Lain-Lain
Rp140.903.000*

C.9 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp140.903.000 dan Rp140.903.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	140,903,000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Transfer Masuk	0
Saldo per 30 Juni 2023	140,903,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(140,453,000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	450,000

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp140.453.000)*

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp140.453.000 dan Rp140.453.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	140.903.000	-140.453.000	450.000
Jumlah	140.903.000	-140.453.000	450.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan

amortisasi.

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp834.457.056*

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp834.457.056 dan Rp30.642.048. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Nilai utang kepada Pihak Ketiga pada periode ini merupakan Belanja pegawai dan belanja barang yang belum terbit SP2D (pencatatan akrual).

No	Rincian	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Pegawai	779,257,056	Belum terbit SP2D
2	Belanja Barang	55,200,000	Belum terbit SP2D
	Jumlah	834,457,056	

*Utang Yang Belum Ditagihkan
Rp48.500.000*

C.12 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp48.500.000. Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2023 merupakan Kuitansi UP Bendahara Pengeluaran yang belum di SPM kan.

*Uang Muka dari KPPN
Rp240.000.000*

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp240.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp105.362.464.944*

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp105.362.464.944 dan Rp 105.324.816.833. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB
Rp8.375.327*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp8.375.327 dan R6.448.094.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8,375,327	6,448,094	29.89
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	0	0.00
Jumlah	8,375,327	6,448,094	29.89

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari pendapatan sewa rumah dinas dari transaksi sampai dengan 30 Juni 2023.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai Rp
6.618.987.234*

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.618.987.234 dan Rp7.099.035.996. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	4,651,263,400	4,948,010,300	12.45
Beban Pembulatan Gaji PNS	74,882	76,375	(1.95)
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	324,091,570	354,312,222	(8.53)
Beban Tunj. Anak PNS	97,627,330	104,625,142	(6.69)
Beban Tunj. Struktural PNS	245,695,000	293,940,000	(16.41)
Beban Tunj. Fungsional PNS	419,782,000	409,477,000	98.71
Beban Tunj. Pph PNS	16,736,892	26,662,641	(37.23)
Beban Tunj. Beras PNS	278,672,160	295,618,440	(5.73)
Beban Uang Makan PNS	441,730,000	439,152,000	(4.44)
Beban Tunj. Umum PNS	108,225,000	119,040,000	(9.09)
Beban Uang Lembur	35,089,000	108,122,000	(67.55)
Jumlah	6,618,987,234	7,099,036,120	(6.76)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	(124)	0.00
Jumlah	6,618,987,234	7,099,035,996	(6.76)

*Beban Persediaan
Rp49.309.226*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp49.309.226 dan Rp53.824.840. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian Jenis Beban	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	49,309,226	53,824,840	(8.39)
Jumlah Beban Persediaan	49,309,226	53,824,840	(8.39)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.907.596.953*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.907.596.953 dan Rp2.429.253.080. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	639,441,115	760,925,452	(15.97)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	952,000	1,965,500	(51.56)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	70,500,000	70,900,000	(0.56)
Beban Barang Operasional Lainnya	3,465,600	5,077,150	(31.74)
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	1,245,000	4,177,500	0.00
Beban Bahan	106,484,600	165,697,550	(35.74)
Beban Honor Output Kegiatan	10,900,000	15,400,000	(29.22)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	66,792,250	12,922,450	416.87
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	53,000,000	145,190,895	0.00
Beban Langganan Listrik	163,755,037	169,020,327	(3.12)
Beban Langganan Telepon	8,220,802	7,914,281	3.87
Beban Langganan Air	10,323,200	13,195,400	(21.77)
Beban Sewa	761,917,349	1,047,987,575	(27.30)
Beban Jasa Profesi	10,000,000	5,800,000	72.41
Beban Jasa Lainnya	600,000	2,000,000	(70.00)
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID19	0	1,079,000	0.00
Jumlah	1,907,596,953	2,429,253,080	(21.47)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp707.560.630

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp707.560.630 dan Rp519.224.802. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
Periode 30 Juni 2023 dan 30 JAuni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	355,998,750	144,348,400	146.62
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351,561,880	374,876,402	(6.22)
Jumlah	707,560,630	519,224,802	36.27

Beban Perjalanan Dinas
Rp857.880.316

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp857.880.316 dan Rp414.736.616. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	627,120,316	328,071,616	91.15
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,700,000	17,500,000	(16.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24,780,000	69,165,000	(64.17)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	191,280,000	0	#DIV/0!
Jumlah	857,880,316	414,736,616	106.85

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp0

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp545.650.438. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	263,518,179	(100.00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	282,132,259	(100.00)
Jumlah Penyusutan	-	545,650,438	(100.00)
Jumlah Amortisasi	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	545,650,438	(100.00)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp370.748

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu sebesar Rp150. Perbandingan Surplus dari Kegiatan Non Operasional PER 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	370,748	150	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	370,748	150	247065.33

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp44.804.071.857

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp105.324.816.833 dan Rp44.808.071.857.

Defisit LO
(Rp18.865.951.244)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar (Rp10.132.588.284) dan (Rp11.055.277.528) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas
Rp10.169.236.395

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.169.236.395 dan Rp8.991.168.690. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas
Periode 30 Juni 20233

Transaksi Antar Entitas	Jumlah
Ditagihkan ke Entitas Lain	9,714,161,375
Ditagihkan dari Entitas Lain	7,444,875
Transfer Masuk	462,519,895
JUMLAH	10,169,236,395

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp7.444.875

sedangkan DKEL sebesar Rp9.714.161.375.

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang (408798) sampai dengan periode 30 Juni 2023 telah menerima transfer masuk dari Ditjen KI senilai Rp520.080.300 dengan daftar sebagai berikut:

*Daftar Barang Transfer Masuk
Periode 30 Juni 2023*

No	Jenis	Jumlah	Entitas Asal	Nilai
1	Video Conference	1 Buah	Ditjen KI	207,985,300
2	Publik Address(Lapangan)	1 Buah	Ditjen KI	90,000,000
3	P.CUnit	10 Buah	Ditjen KI	210,300,000
4	Laptop	1 Buah	Ditjen KI	11,795,000
Jumlah				520,080,300

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp1.456.000 yang merupakan transfer keluar Peralatan dan Mesin berupa meja kayu ke satuan kerja Rupbasan Padang.

E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp105.361.464.944*

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp105.361.464.944 dan Rp42.743963.019.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- Pada periode Juni 2023 ini telah dilakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian khusus yang dibuat pada 31 Desember 2022 yang berasal dari utang beban daya dan jasa listrik sebesar Rp30.642.048.
- Pada Neraca Akrual juga terdapat Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp779.257.056 disebabkan Gaji Pegawai bulan Juli yang belum keluar SP2D dan belanja barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp55.200.000 disebabkan Belanja barang yang belum keluar SP2D.

LAMPIRAN

